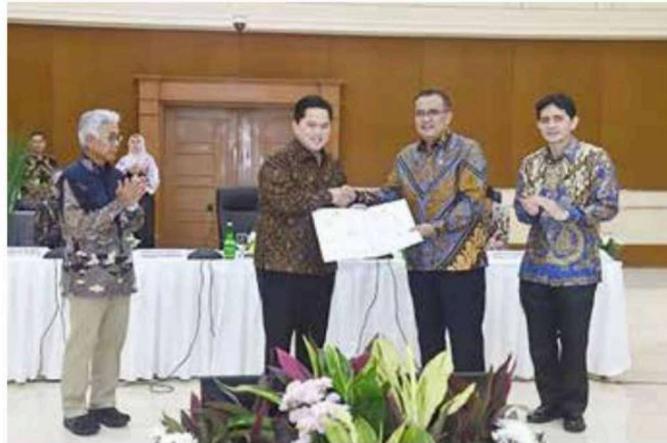


Ini Hal yang Disoroti BPK Terkait Kompensasi BBM dan Listrik

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti beberapa hal yang harus mendapat perhatian terkait dengan subsidi. Salah satunya adalah belanja kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik tahun 2022 yang meningkat drastis hingga mencapai Rp352 triliun. Angka tersebut melebihi jumlah total subsidi untuk semua sektor, yaitu Rp245 triliun.

"Subsidi memang ditargetkan untuk masyarakat kurang mampu, namun untuk kompensasi nyatanya lebih banyak dinikmati kalangan mampu," ujar Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/ Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo pada saat memimpin *entry meeting* pemeriksaan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan BUMN, di kantor pusat BPK, Senin (15/1/2024).





◀
 Pimpinan Pemeriksaan
 Keuangan Negara/
 Anggota VII
 BPK Slamet Edy
 Purnomo pada saat
 memimpin *entry
 meeting* pemeriksaan
 Kementerian BUMN,
 SKK Migas, dan BUMN,
 di kantor pusat BPK,
 Senin (15/1/2024).

Atas hal tersebut, Anggota VII BPK pun mengingatkan agar Pertamina, Perusahaan Listrik Negara (PLN), Kementerian BUMN bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM untuk segera mendorong penyesuaian dengan harga yang sifatnya *forward looking*. Dengan begitu, neraca pemerintah maupun BUMN bisa menjadi lebih sehat.

"Makanya kami disini juga mengundang rekan-rekan dari Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) II yang membawahi pemeriksaan di Kementerian Keuangan, AKN IV yang memeriksa Kementerian ESDM, sehingga kami dalam mencari solusi tidak berdiri sendiri, melainkan berkoordinasi lintas AKN," jelasnya.

Menutup sambutannya, Anggota VII BPK menekankan perlunya dilakukan perbaikan atas permasalahan sistem pengendalian intern. Oleh karena itu, komunikasi antara BPK dan entitas harus ditingkatkan.

Anggota VII BPK menjelaskan, *entry meeting* merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK selaku pemeriksa dengan kementerian dan lembaga yang akan diperiksa. Tujuannya, untuk mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses dan pelaksanaan pemeriksaan.